

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

**DINAS PERINDUSTRIAN DAN
TENAGA KERJA
KOTA PROBOLINGGO**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIS
PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KOTA PROBOLINGGO

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **RACHMA NURCAHYARINI, S.Sos., M.Si.**
J a b a t a n : Sekretaris Dinas Perindustrian dan
Tenaga Kerja

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

N a m a : **BUDIONO WIRAWAN, S.Sos., M.Si.**
J a b a t a n : Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang di perlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Probolinggo, Januari 2025

Pihak Kedua,

BUDIONO WIRAWAN, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19691220 199003 1 009

Pihak Pertama,

RACHMA NURCAHYARINI, S.Sos., M.Si.
Pembina Tk. I
NIP. 19731110 199302 2 002

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIS
PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA PROBOLINGGO

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan Tata Usaha, Perkantoran, Program dan Keuangan	1. Jumlah Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen/Laporan
		2. Prosentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Daerah	80%
		3. Jumlah Dokumen/Laporan Adminstrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 Dokumen/ Laporan
		4. Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Dokumen/Laporan
		5. Jumlah Dokumen/Laporan Adsministrasi Umum Perangkat Daerah	12 Dokumen/Laporan
		6. Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Dearah	1 Laporan
		7. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan
		8. Jumlah Dokumen/Laporan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	12 Dokumen/Laporan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 8.875.379.112	DAU
	1.1 Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Rp 56.789.000	DAU
	1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 7.922.0428.87	DAU
	1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	Rp 6.250.000	DAU
	1.4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 4.050.000	DAU
	1.5 Administrasi Umum Perangkat daerah	Rp 238.975.896	DAU
	1.6 Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Rp 74.500.000	DAU
	1.7 Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Rp 407.223.760	DAU
	1.8 Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Rp 240.047.500	DAU

Probolinggo, Januari 2025

Pihak Kedua,



BUDIONO WIRAWAN, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19691220 199003 1 009

Pihak Pertama,



RACHMA NURCAHYARINI, S.Sos., M.Si.
Pembina Tk. I
NIP. 19731110 199302 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA PROBOLINGGO

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANDAYANI RESMI HARYATI,S.IP
Jabatan : Kasubbag Tata Usaha Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RACHMA NURCAHYARINI,S.Sos,M.Si
Jabatan : Sekertaris Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Probolinggo, 02 Januari 2025

PIHAK KEDUA
SEKERTARIS
DINAS PERINDUSTRIAN DAN
TENAGA KERJA

RACHMA NURCAHYARINI,S.Sos,M.Si
Penata Tingkat I
NIP. 19731110 199302 2 002

PIHAK PERTAMA
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN
TENAGA KERJA

ANDAYANI RESMI HARYATI,S.IP
Penata Tingkat I
NIP. 19760327 200312 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Administrasi Umum dan Kepegawaian	Jumlah laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Dokumen Laporan
		Jumlah Laporan Administrasi umum Perangkat Daerah	12 Dokumen Laporan
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Dokumen Laporan
2	Meningkatnya Kinerja Penata Usahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah	12 Dokumen Laporan
		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan
		Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Dokumen Laporan

Sub Kegiatan

Anggaran

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai | Rp. 4.050.000,- |
| 2. Penyediaan Peralatan dan Perlegkapan Kantor | Rp. 28.476.500,- |
| 3. Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan | Rp. 6.272.500,- |
| 4. Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Rp. 3.120.000,- |
| 5. Fasilitasi Kunjungan Tamu | Rp. 7.000.000,- |
| 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Rp. 164.726.895,- |
| 7. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Rp.4.150.000,- |
| 8. Dukungan Pelaksanaan sistem pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Rp. 25.230.000,- |

9. Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 126.990.000,-
10. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 280.233.760,-
11. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp. 6.250.000,-
12. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 74.500.000,-
13. Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 88.437.600,-
14. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 24.000.000,-
15. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Rp. 127.610.000,-
	RP. 971.047.255,-

Probolinggo,02 Januari 2025

Pihak Kedua
SEKERTARIS
DINAS PERINDUSTRIAN DAN
TENAGA KERJA



RACHMA NURCAHYARINI,S.Sos,M.Si

Penata Tingkat I

NIP. 19731110 199302 2 002

Pihak Pertama
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN
TENAGA KERJA



ANDAYAN RESMI HARYATI,S.IP

Penata Tingkat I

NIP. 19760327 200312 2 001

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA

TUGAS POKOK:

- 1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- 4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

NO	KINERJA / SASARAN UTAMA / OUTCOME	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya kinerja pelayanan administrasi umum dan kepegawaian	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang tepat waktu	Dokumen laporan kepegawaian
		Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah	

		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	
2	Meningkatnya kinerja penatausahaan barang milik daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan administrasi barang pada perangkat daerah Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yg efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NGATMITO, S.Sos.**

Jabatan : Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kota Probolinggo

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **BUDIONO WIRAWAN, S.Sos., M.Si.**

Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Probolinggo, 02 Januari 2025

Pihak Kedua

Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga
Kerja Kota Probolinggo

BUDIONO WIRAWAN, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19691220 199003 1 009

Pihak Pertama

Kepala Bidang Perindustrian

NGATMITO, S.Sos.

Penata Tingkat I

NIP. 19670425 198903 1 008

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

KEPALA BIDANG PERINDUSTRIAN

DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

KOTA PROBOLINGGO

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Produktifitas Sektor Unggulan Daerah	Peningkatan Nilai Produksi Sektor Industri	50 M
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	4 Dokumen
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	8 Dokumen
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2 Dokumen
		Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen
		Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota	10 Dokumen
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	4 Dokumen

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	40.112.850,-
2.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	176.499.309,-
3.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	16.871.778,-
4.	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1.650.000,-
5.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	15.828.097,-
6.	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	22.269.830,-
Jumlah		273.231.864,-

Probolinggo, 02 Januari 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo

Kepala Bidang Perindustrian


BUDIONO WIRAWAN, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19691220 199003 1 009


NGATMITO, S.Sos.
Penata Tingkat I
NIP. 19670425 198903 1 008

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Jabatan	:	Kepala Bidang Perindustrian
Tugas	:	Merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pembangunan industri, perizinan industri dan pengelolaan sistem informasi industri nasional
Fungsi	:	a. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 1) Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi 2) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri 3) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri 4) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 5) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 6) Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri b. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) 1) Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) c. Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota 1) Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 2) Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas 3) Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas

Butir Kegiatan : -

No.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Produktifitas Sektor Unggulan Daerah	Peningkatan Nilai Produksi Sektor Industri	Nilai Produksi Sektor Industri tahun (n) – Nilai Produksi Sektor Industri tahun (n-1) <i>Penjelasan:</i> Laporan yang berisi Pertumbuhan Nilai produk (barang atau jasa) yang dihasilkan dari proses produksi, dihitung berdasarkan banyaknya produksi dan harga per unit produksi.	Bidang Perindustrian
2	Tertaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Penyusunan Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri <i>Penjelasan:</i> Kegiatan pembangunan sumber daya industri sebagai upaya peningkatan kualitas dan kuantitas keterampilan usaha produksi	Bidang Perindustrian
3	Tertaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Penyusunan Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri <i>Penjelasan:</i> Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Bidang Perindustrian
4	Tertaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Penyusunan Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat <i>Penjelasan:</i> Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Bidang Perindustrian
5	Tertaksananya Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Penyusunan Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri <i>Penjelasan:</i> Dokumen berisi laporan Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Bidang Perindustrian
6	Tertaksananya Pemantauan, Pengawasan dan Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan Izin Usaha Industri dalam Memenuhi Ketentuan Perizinan	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota <i>Penjelasan:</i> Dokumen berisi Laporan Pelaksanaan dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota	Bidang Perindustrian
7	Tertaksananya Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Sistem Informasi Industri Nasional (SIInas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIInas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIInas) <i>Penjelasan:</i> Dokumen berisi Laporan Pelaksanaan Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIInas)	Bidang Perindustrian



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA PROBOLINGGO

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **TRI AGUS WIBOWO, S.Pd.M.Pd**
J a b a t a n : Kepala Bidang Penempatan, Perluasan,
Pelatihan Dan Produktivitas Tenaga Kerja.

Selanjutnya disebut pihak pertama

N a m a : **BUDIONO WIRAWAN, S.Sos., M.Si.**
J a b a t a n : Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota
Probolinggo

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang di perlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Probolinggo, Januari 2025

Pihak Kedua
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kota Probolinggo

BUDIONO WIRAWAN, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19691220 199003 1 009

Pihak Pertama
Kepala Bidang Penempatan, Perluasan, Pelatihan
dan Produktivitas Tenaga Kerja

TRI AGUS WIBOWO, S.Pd.M.Pd
Pembina
NIP. 19770223 200604 1 016

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA PROBOLINGGO

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya penempatan penempatan tenaga kerja dan perluasan tenaga kerja	Prosentase Data Penempatan dan Data Pencari Kerja	90%
2.	Meningkatnya pelatihan yang berbasis kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Prosentase pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	90%
		Jumlah perusahaan yang melaksanakan program produktivitas Perusahaan	4 Perusahaan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Rp. 3,400,296,200	APBD dan DBHCHT
2	Koordinasi lintas Lembaga dan Kerjasama dengan sektor Swasta untuk penyediaan dan struktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja	Rp .171,558,000	APBD
3	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Rp. 38,332,630	APBD
4	Perluasan kesempatan kerja	Rp . 97,152,000	APBD
5	Job Fair/Bursa Kerja	Rp. 40,000,000	APBD
JUMLAH		Rp. 3.747 338 830	

Probolinggo, Januari 2025

Pihak Kedua
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kota Probolinggo



BUDIONO WIRAWAN, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19691220 199003 1 009

Pihak Pertama
Kepala Bidang Penempatan, Perluasan, Pelatihan
dan Produktivitas Tenaga Kerja



TRI AGUS WIBOWO, S.Pd.M.Pd
Pembina
NIP. 19770223 200604 1 016

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

- 1. **JABATAN** : Kepala Bidang Penempatan, Perluasan, Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
- 2. **TUGAS** : (1) kegiatan, perumusan, penyusunan, pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan dibidang penempatan, perluasan, pelatihan, perumusan, perluasan, pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan dibidang penempatan, perluasan, pelatihan dan produktifitas tenaga kerja yang meliputi Bidang Penempatan, Perluasan, Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan penempatan, perluasan kerja dan transmigrasi, serta pelatihan dan produktifitas tenaga kerja.

- 3. **FUNGSI** :
 - a. perumusan rencana kerja dibidang penempatan, perluasan, pelatihan dan produktifitas tenaga kerja yang meliputi penempatan, perluasan kerja dan transmigrasi, serta pelatihan dan produktifitas tenaga kerja;
 - b. perumusan kebijakan teknis dibidang penempatan, perluasan, pelatihan dan produktifitas tenaga kerja yang meliputi penempatan, perluasan kerja dan transmigrasi, serta pelatihan dan produktifitas tenaga kerja;
 - c. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan tugas dibidang penempatan, perluasan, pelatihan dan produktifitas tenaga kerja yang meliputi penempatan, perluasan kerja dan transmigrasi, serta pelatihan dan produktifitas tenaga kerja;
 - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang penempatan, perluasan, pelatihan dan produktifitas tenaga kerja yang meliputi penempatan, perluasan kerja dan transmigrasi, serta pelatihan dan produktifitas tenaga kerja; dan
 - e. pelaksanaan fungsi dinas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
Terwujudnya penempatan tenaga kerja dan pelatihan yang berbasis kompetensi	% pencari kerja yang ditempatkan pada sektor formal dan informal	$\sum \frac{\text{pencari kerja yang ditempatkan}}{\text{Jumlah pencari kerja yang terdaftar}} \times 100\%$	Data penempatan dan data pencari kerja (Ak.1)

Probolinggo, 02. Januari 2025

Pihak Kedua

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KOTA PROBOLINGGO

Pihak Pertama

KEPALA BIDANG PENEMPATAN, PERLUASAN, PELATIHAN
DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA



BUDIONO WIRAWAN, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19691220 199003 1 009



TRI AGUS WIBOWO, S.Pd.M.Pd
Pembina
NIP. 19770223 200604 1 016



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN
PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KOTA PROBOLINGGO

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah in

Nama : DYAH SUSILANINGTYAS ,S.Sos, M.Si

Jabatan : Kasubag. Program dan Keuangan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RACHMA NURCAHYARINI, S.Sos, M.Si

Jabatan : Sekretaris Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Probolinggo, Januari 2025

Pihak Kedua
SEKRETARIS
DINAS PERINDUSTRIAN DAN
TENAGA KERJA KOTA PROBOLINGGO

RACHMA NURCAHYARINI, S.Sos., M.Si.

Pembina Tingkat I
NIP. 1973110 1993022002

Pihak Pertama
KASUBAG. PROGRAM DAN KEUANGAN

DYAH SUSILANINGTYAS, S.Sos, M.Si

Pembina
NIP. 19741227 199602 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Laporan Keuangan yang Tepat Waktu	12 Laporan
		Persentase Realisasi Keuangan Kegiatan Dengan Capaian 80%	80 %
2.	Terwujudnya Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun Tepat waktu	10 Dokumen
		Jumlah Dokumen Pelaporan yang tersusun tepat waktu	10 Laporan

Sub Kegiatan

Anggaran

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 7.796.505.887
2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp. 116.642.000
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp. 8.895.000
4. Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	RP. 32.144.000
5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 24.545.000
	Rp. 7.978.731.887

Probolinggo, Januari 2025

Pihak Kedua
SEKRETARIS

DINAS PERINDUSTRIAN DAN
TENAGA KERJA KOTA PROBOLINGGO



RACHMA NURCAHYARINI, S.Sos., M.Si
PembinaTingkat I
NIP. 1973110 1993022002

Pihak Pertama
KASUBAG. PROGRAM DAN KEUANGAN



DYAH SUSILANINGTYAS, S.Sos, M.Si
Pembina
NIP. 19741227 199602 2 001

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

JABATAN : Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
 TUGAS POKOK : a. Perencanaan, Penganggaran' dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 c. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

NO	KINERJA/ SASARAN UTAMA/OUTCOME	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Pengelolaan administrasi Keuangan yang Akuntabel	Terpenuhinya Laporan Keuangan yang tepat waktu Persentase Realisasi Keuangan Kegiatan dengan capaian minimal 80%	Jumlah Laporan Keuangan yang tepat waktu X 100% Jumlah Laporan Keuangan Jumlah Realisasi Keuangan yang tepat waktu	Dokumen Laporan Keuangan LRA
2.	Terwujudnya Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	Jumlah Dokumen Perencanaan yang di susun tepat waktu dan Pelaporan	Jumlah Dokumen Perencanaan Program Kerja dan Kegiatan Dinas yang selesai disusun Dokumen Perencanaan meliputi : 1. Dokumen RKPD 2. Dokumen Renja 3. DokumenRenja P-APBD 4. Dokumen KU/APPAS 5. Dokumen RAPBD 6/ Dolumen R-PAPBD 7. Dokumen Probis 8, Dokumen LPPD 9. Dokmen Rensra 10. Dokumen SPP	1. Dokumen RKPD 2. Dokumen Renja 3.Dokumen Renja P-APBD 4. Dokumen KU/APPAS 5. Dokumen RAPBD 6 Dolumen R-PAPBD 7. Dokumen Probis 8, Dokumen LPPD 9. Dokmen Rensra 10. Dokumen SPP

		Jumlah Dokumen Pelaporan yang telah disusun tepat waktu	Jumlah Dokumen pelaporan Dinas yang di susun tepat waktu Pelaporan meliputi 1. Dokumen /LaporanLKPJ 2. Dokumen LKJIP 3. Dokumen LKPD 4. Dolumen Sakip 5. Evaluasi RKPd Triwulan I, 6. Evaluasi RKPd Triwulan II 7. Eavaluasi RKPd TriwulanIII, 8. Evaluasi RKPd TriwulanIV 9. Pengukuran Kinerja 10. SKM	1. Dokumen LKPJ 2. Dokumen LKJIP 3. Dokumen LKPD 4. Dolumen Sakip 5. Evaluasi RKPd Triwulan I, I 6. Eavaluasi RKPd Triwulan II 7. Evaluasi RKPd Triwulan III 8. Evaluasi RKPd Triwulan IW 9. Pengukuran Kinerja 10. SKM
--	--	--	--	---



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : BUDIONO WIRAWAN, S.Sos. M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : DEWI ARLIANA PUSPITASARI, SH, MM
Jabatan : Plt. Kepala Bidang Hubungan Industrial
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang di perlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Probolinggo, 2 Januari 2025

Pihak Kedua

Kepala Dinas Perindustrian dan
Tenaga Kerja Kota Probolinggo,

BUDIONO WIRAWAN, S.Sos. M.Si
NIP. 19691220 199003 1 009

Pihak Pertama

Plt. Kepala Bidang Hubungan Industrial

DEWI ARLIANA PUSPITASARI, SH,MM
NIP. 19760706 200801 2 015

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya persentase perusahaan yang memenuhi persyaratan kerja	Persentase perusahaan yang memenuhi persyaratan kerja	72%
2	Terwujudnya persentase penurunan kasus perselisihan hubungan industrial	Persentase penurunan kasus perselisihan hubungan industrial	52%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Hubungan Industrial	Rp. 2. 379.046.600	Dana APBD

Probolinggo, 2 Januari 2025

Pihak Kedua

Kepala Dinas Perindustrian dan
Tenaga Kerja Kota Probolinggo,



BUDIONO WIRAWAN, S.Sos. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19691220 199003 1 009

Pihak Pertama

Ptl. Kepala Bidang Hubungan Industrial,



DEWI ARLIANA PUSPITASARI, SH,MM
Pembina
NIP. 19760706 200801 2 015

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. JABATAN : Kepala Bidang Hubungan Industrial
2. TUGAS : Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan, perumusan, penyusunan, pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang hubungan industrial tenaga kerja ;
3. FUNGSI :

a. Perumusan rencana kerja di bidang hubungan industrial ;

b. Perumusan kebijakan teknis hubungan industrial ;

c. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan tugas di bidang hubungan industrial;

d. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang hubungan industrial dan

e. Pelaksanaan fungsi dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
Terwujudnya persentase perusahaan yang memenuhi persyaratan kerja	Persentase perusahaan yang memenuhi persyaratan kerja	$\frac{\text{Perusahaan memenuhi persyaratan kerja}}{\text{Total Perusahaan}} \times 100 \%$ Ket : Perusahaan adalah Perusahaan dengan Kategori Menengah Keatas	- Data peraturan perusahaan Perjanjian kerja bersama (PP dan PKB)
Terwujudnya persentase penurunan kasus perselisihan hubungan industrial	Persentase penurunan kasus perselisihan hubungan industrial	$\frac{(\text{kasus perselisihan hub industrial tahun } n) - (\text{kasus perselisihan hub industrial tahun } n - 1)}{(\text{kasus perselisihan hub industrial tahun } n - 1)} \times 100 \%$	- Data perjanjian bersama dan anjuran

Pihak Kedua
Kepala Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kota Probolinggo,

BUDIONO WIRAWAN, S.Sos. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19691220 199003 1 009

Pihak Pertama
Plt. Kepala Bidang Hubungan Industrial

DEWI ARLIANA PUSPITASARI, SH.MM
Pembina
NIP. 19760706 200801 2 015